

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah:

1. Aspek Komunikasi, komunikasi kebijakan P5 telah diterapkan secara cukup efektif melalui kejelasan informasi, transmisi yang berjenjang dan multi-arah, serta konsistensi penyampaian. Sekolah memanfaatkan berbagai media dan forum untuk menyosialisasikan kebijakan kepada guru, siswa, dan orang tua. Namun, keterbatasan waktu pelatihan, kurangnya modul resmi, serta ketimpangan akses informasi di kalangan wali murid menunjukkan perlunya penguatan literasi kebijakan dan peningkatan intensitas komunikasi dua arah secara lebih sistematis.
2. Aspek Sumber Daya, dukungan sumber daya manusia tergolong memadai dari sisi kuantitas dan kolaborasi antar guru. Pelatihan dan forum diskusi telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan P5. Pendanaan kegiatan berasal dari dana BOS dan partisipasi wali murid yang dikelola secara transparan, namun masih menghadapi kendala dalam hal sosialisasi standar pembiayaan dan kejelasan peran. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek.
3. Aspek Disposisi, komitmen kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terhadap P5 sangat kuat. Kepala sekolah berperan aktif dalam semua tahapan implementasi dan memfasilitasi kolaborasi serta inovasi. Sikap positif dan partisipatif dari guru, siswa, dan wali murid menunjukkan bahwa P5 dipahami sebagai sarana strategis dalam pembentukan karakter siswa secara holistik berbasis nilai-nilai Pancasila, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemahaman konseptual dan teknis.
4. Aspek Struktur Birokrasi, struktur pelaksanaan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah telah berjalan sesuai prosedur yang baku dan sistematis melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). *Standard Operating Prosedure* berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan proyek, termasuk pembagian peran, perencanaan, hingga evaluasi. Walaupun sebagian warga sekolah belum memahami isi SOP secara mendalam, pelaksanaan program yang tertib mencerminkan bahwa struktur organisasi dan tata kelola telah diimplementasikan secara fungsional dan efektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis merekomendasikan agar implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah memperkuat beberapa strategi yang tepat. Dalam aspek komunikasi, diperlukan peningkatan pemahaman kebijakan secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya wali murid, melalui penyusunan modul resmi dan pelatihan berkala serta optimalisasi komunikasi dua arah secara sistematis. Pada aspek sumber daya, disarankan untuk menyesuaikan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan P5 melalui mentoring dengan koordinator P5 dari korwilcam, serta memperjelas nominal anggaran kegiatan P5 kepada orang tua guna meningkatkan transparansi dan partisipasi. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang harus segera ditindak lanjuti guna memperlancar pelaksanaan P5. Dalam aspek disposisi, meskipun semangat dan komitmen warga sekolah sudah tinggi, tetap dibutuhkan penguatan pemahaman konseptual dan teknis tentang P5 agar implementasinya tidak hanya semangat, tetapi juga berkualitas. Terakhir, pada aspek struktur organisasi, disarankan dilakukan sosialisasi dan pendalaman pemahaman terhadap SOP kepada seluruh elemen sekolah agar pelaksanaan proyek tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga sepenuhnya dipahami dan dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.